



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**UNIT KERJA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WALUYO
2. Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3. NHK : 108826

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 396 m2/150 m2 di REMBANG, WARISAN Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 380 m2 di REMBANG, WARISAN Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/60 m2 di REMBANG, WARISAN Rp. 1.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 360.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RU1 1,5 S CV CK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 183.630.712

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 2.643.630.712

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.643.630.712

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.